



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 60 TAHUN 2020**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERIKANAN
TAHUN 2021**

Sarilamak, Juli 2020

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur disampaikan kehadirat Allah kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmatNya Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 telah selesai dilaksanakan.

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 berpedoman kepada RENSTRA Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 s.d 2021 serta mengacu kepada RPJMD Tahun 2016 s.d 2021. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perikanan Tahun 2021 juga memperhatikan hasil hasil Musrenbang Nagari dan Kecamatan.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perikanan Tahun 2021 ini melibatkan berbagai pihak, baik dari internal Dinas Perikanan maupun dari para pemangku kepentingan yang peduli terhadap pembangunan Perikanan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk itu, atas dukungan dan kontribusi yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 ini disusun, semoga apa yang telah direncanakan bersama dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat untuk masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sarilamak, 21 Juli 2020


P. KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PERIKANAN
I. SEPDI PAINDAYERI
NIP. 1965090-199303 1 004



**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 60 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590) ;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 144);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2018 Nomor 1);

20. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140).
21. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah satuan kerja di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.
10. Kebijakan Umum Anggaran, yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang

- diberikan kepada PD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
 13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
 14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pasal 2

Maksud penyusunan Renja PD adalah untuk :

- a. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2021 sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing PD; dan
- b. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing PD untuk tahun 2021.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renja PD adalah untuk :

- a. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf PD dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2021;
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
- c. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD tahun 2021.

BAB II

SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 4

(1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan

Capaian Renstra PD

- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Kepala PD menyusun Renja PD Tahun 2021 dengan berpedoman kepada RKPD Tahun 2021 dan Renstra PD.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penjabaran dari RKPD.
- (3) PD menyusun RKA Tahun 2021 dengan berpedoman kepada Renja PD.

Pasal 6

Agar program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja PD dapat dilaksanakan serta untuk mewujudkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pembangunan, maka PD harus memastikan substansi Renja PD dapat dituangkan ke dalam DPA PD Tahun 2021.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan Renja PD ini bersumber dari APBD Kabupaten.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD.
- (2) Dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 5 Agustus 2020

BUPATI LIMA PULUH KOTA

ttd

IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 5 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd

WIDYA PITRA
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2020 NOMOR 60



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
PERBUB NOMOR 33 TAHUN 2019	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-1
1.3 Maksud dan Tujuan	I-3
1.4 Sistematika Penulisan	I-4
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perikanan.....	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan	II-7
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan	II-9
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-9
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II-14
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	III-1
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota.....	III-1
3.1.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	III-1
3.1.2. Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi Sumatera Barat.....	III-1
3.1.3. Telaahan terhadap Kebijakan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.....	III-2
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perikanan.....	III-3
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV-1
4.1 Rencana Kerja	IV.1
4.2 Pendanaan	IV.1
BAB V : PENUTUP	V-1



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 60 TAHUN 2020**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERIKANAN
TAHUN 2021**

Sarilamak, Juli 2020

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan dan Pencapaian Renstra Dinas Perikanan s/d Tahun 2018 Kabupaten Lima Puluh Kota.....	II-3
Tabel 2.2	: Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan dan Kabupaten Lima Puluh Kota.....	II-8
Tabel 2.3	: Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Kabupaten Lima Puluh Kota.....	II-11
Tabel 2.4	: Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2020 Kabupaten Lima Puluh Kota.....	II-15
Tabel 3.1	: Program dan Kegiatan yang ada pada setiap OPD.....	III.4
Tabel 4.1	: Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Kabupaten Lima Puluh Kota	IV.2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Permendagri Nomor 86 tahun 2017, perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Sedangkan menurut Undang Undang 25 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Proses penyusunan Rencana Perangkat Daerah disusun mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Semua jenis perencanaan ini merupakan dokumen perencanaan di tingkat kabupaten. Sedangkan untuk tingkatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga dilakukan penyusunan perencanaan, yaitu Rencana Strategis OPD (Renstra-OPD) dengan ruang lingkup waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja OPD (Renja-OPD) dengan ruang lingkup waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Tahun 2021 ini merupakan Tahun ke-5 dan harus menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021. Dengan mempedomani Visi dan Misi pembangunan daerah tahun 2016 s.d 2021 dan Rencana Strategis Dinas perikanan Tahun 2016 – 2021. Rencana kerja Dinas Perikanan disinkronkan dengan Renja Kementerian Kelautan dan

Perikanan, Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Barat. Rencan Kerja ditindak lanjuti dengan penyusunan Pra RKA Tahun 2021. Program dan kegiatan yang disusun disinkronkan dengan program Prioritas yang ada dalam RPJMD Tahun 2016 s/d 2021 dengan memuat hasil Musrenbang Nagari, Kecamatan dan Kabupaten serta pokok pokok pikiran DPRD. Dengan demikian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya Dinas Perikanan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan untuk Tahun 2021.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 - 2025.
7. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
8. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

9. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 – 2025.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4)
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 88 Tahun 2018 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Eselon pada Dinas Perikanan (lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor)

17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 (lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor)

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan ini adalah untuk :

1. Menjabarkan program dan kegiatan Dinas Perikanan yang mengacu kepada program Prioritas yang ada pada RPJMD Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2016 s.d 2021, Renstra Dinas Perikanan Tahun 2016 s.d 2021 sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota serta pokok pokok pikiran DPRD.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2021 sesuai dengan urusan dan kewenangan Dinas Perikanan
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perikanan untuk tahun 2021.

Berkaitan dengan maksud di atas Rencana Kerja Dinas Perikanan ini bertujuan untuk :

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Perikanan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2021.
2. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan.
3. Tercapainya target pembangunan dengan menggunakan sumberdaya secara efektif , efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Dinas Perikanan
5. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perikanan pada tahun 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2021 ini terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, dengan Renstra OPD, dengan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, dan dengan Renja Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta tindak lanjutnya dengan penyusunan RKA OPD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat uraian tentang Undang –Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan Penganggaran OPD

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen

II. BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERIKANAN TAHUN LALU

Berisikan kajian (review) terhadap hasil pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Perikanan, analisis kinerja pelayan Dinas Perikanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan sebagainya.

- III. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
 - 3.3 Program dan Kegiatan

- IV. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - 4.1 Rencana Kerja
 - 4.2 Pendanaan

- V. PENUTUP
 - Berisikan ketentuan Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perikanan

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 meliputi beberapa hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian renstra Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota sampai dengan tahun 2019 dapat di uraikan pada Tabel TC 1:

Tabel T-C.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan dan Pencapaian Renstra Dinas Perikanan sampai dengan Tahun 2019
Kabupaten Lima Puluh Kota

OPD : DINAS PERIKANAN

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Target Capaian Capaian Kinerja Program Resntra OPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2018/ (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2019 (Tahun Lalu/ n-1)			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan / Tahun 2020/ (n)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2020 (Tahun berjalan/n)	
					Target Renja OPD Tahun 2019/(n-1)	Realisasi Renja OPD Tahun 2019/ (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020 / Tahun Berjalan (n)	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= 7+9	11=(10/4)
2 05 XX 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran	100%	20%	20%	20%	100	20%	80%	80
2 05 XX 01 01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	% Jumlah Penyediaan surat menyurat	100%	20%	20%	20%	100	20%	80%	80
2 05 XX 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya air dan listrik	% Jumlah penyediaan kebutuhan air , listrik, telepon dan internet	100%	20%	20%	20%	100	20%	80%	80
2 05 XX 01 07	Penyediaan Jasa Adminstrasi keuangan	Tersedianya honororium pengelola kegiatan dan uang lembur	100%	20%	20%	20%	100	20%	80%	80
2 05 XX 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	% Jumlah alat tulis Kantor	100%	20%	20%	20%	100	20%	80%	80
2 05 XX 01 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	% Jumlah Barang cetak dan penggandaan	100%	20%	20%	20%	100	20%	80%	80
2 05 XX 01 12	Penyediaan Komponen instalasi listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	%Jumlah alat alat listrik dan elektronik	100%	20%	20%	20%	100	20%	80%	80
2 05 XX 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	% Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	100%	20%	20%	20%	100	20%	80%	80
2 05 XX 01 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	% Jumlah alat alat rumah tangga	100%	20%	20%	20%	100	20%	80%	80

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Target Capaian Kinerja Program Resntra OPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2018/ (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2019 (Tahun Lalu/ n-1)			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan / Tahun 2020/ (n)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2020 (Tahun berjalan/n)	
					Target Renja OPD Tahun 2019/(n-1)	Realisasi Renja OPD Tahun 2019/ (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020 / Tahun Berjalan (n)	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= 7+9	11=(10/4)
2 05 XX 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang undangan	% jumlah Buku Teknis perikanan, Peraturan Perundang undangan dan tersedianya koran, majalah	100%	20%	20%	20%	100	20%	80%	80
2 05 XX 01 17	Penyediaan makan minum	Terlaksananya rapat dinas	100%	20%	20%	20%	100	20%	80%	80
2 05 XX 01 18	Rapat Koordinasi keluar daerah	Tersedianya biaya operasional perjalanan dinas	100%	20%	20%	20%	100	20%	80%	80
2 05 XX 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	95%	17%	17%	17%	100	18%	69%	73
2 05 XX 02 05	Pengadaan kendaraan dinas	Tersedianya Kendaraan Dinas	100%				-	100%	100%	100
2 05 XX 02 10	Pengadaan Mobiler	% Jumlah Mobiler Kantor	87%	0%	0%	0%	-	0%	0%	0
2 05 XX 02 24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Tersedianya biaya operasional kendaraan dinas	95%	17%	17%	17%	100	18%	69%	73
2 05 XX 02 26	Pemeliharaan rutin / berkala Gedung kantor	Terlaksananya perawatan gedung kantor	95%	17%	17%	17%	100	18%	69%	73
2 05 XX 02 42	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	Terehapnya kantor dinas perikanan	95%	17%	17%	17%	100	18%	69%	73
2 05 XX 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	150 stel	0	0	0	-	0	0%	
2 05 XX 03 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	150 stel	0	0	0	-	0	0%	
2 05 XX 03 03	Pengadaan Pakaian Khusus hari tertentu	Tersedianya Pakaian hitam putih dan pakaian kedaerahan	150 stel	0	0	0	-	0	0%	

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Target Capaian Kinerja Program Resntra OPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2018/ (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2019 (Tahun Lalu/ n-1)			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan / Tahun 2020/ (n)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2020 (Tahun berjalan/n)						
					Target Renja OPD Tahun 2019/(n-1)	Realisasi Renja OPD Tahun 2019/ (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020 / Tahun Berjalan (n)	Tingkat Realisasi (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= 7+9	11=(10/4)					
2	05	XX	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur	90%	10%	10%	10%	-	100	20%	60%	67
2	05	XX	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Peningkatan SDM Aparatur	100%	0%	0%	0%	-	100	20%	20%	20
2	05	XX	05	02	Sosialisasi Peraturan Perundang undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang undangan	80%	10%	10%	10%	100	100	20%	40%	50
2	05	XX	06		Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan	40 dok	8 dok	8 dok	8 dok	-	100	8 dok	32 dok	40
2	05	XX	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar realisasi Kinerja SKPD	Terseusunya Renja, Renstra, DPA, Lakip dan Monev Kegiatan	35 dok	7 dok	7 dok	7 dok	100	100	7 dok	28 dok	40
2	05	XX	06	02	Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100	100	1 dok	4 dok	40
2	05	XX	20		Program pengembangan budidaya perikanan	Tingkat produksi Perikanan yang unggul	61.409,03 ton/ tahun, 450 juta ekor/ tahun, 2.056,51 ha, 737 klp	43.992,5ton/ tahun , 428 juta ekor/ tahun, 2.041,51 ha, 566 klp	51.218,40 ton/ tahun, 425 juta ekor/ tahun, 2.046,51 ha, 566 klp	44.274,28 ton/ tahun, 441 juta ekor/ tahun, 2.041,51 ha, 615 klp	95.63	56.073,83 ton/ tahun, 430 juta ekor/ tahun, 2.051,51 ha, 671 klp	56.073,83 ton/ tahun, 430 juta ekor/ tahun, 2.051,51 ha, 671 klp	92	
2	05	XX	20	01	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Meningkatnya produksi ikan	61.409,03 ton/ tahun	43.992,5 ton/ tahun	51.218,40 ton/ tahun	44.274,28 ton/ tahun	95.63	56.073,83 ton/ tahun	56.073,83 ton/ tahun		92
2	05	XX	20	02	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	Meningkatnya jumlah kelembagaan profesional bidang perikanan	737 klp	579 klp	615 Klp	615 klp	102.29	671 klp	671 klp		91

Kode Rekening					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Target Capaian Kinerja Program Resntra OPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2018/ (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2019 (Tahun Lalu/ n-1)			Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan / Tahun 2020/ (n)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2020 (Tahun berjalan/n)	
									Target Renja OPD Tahun 2019/(n-1)	Realisasi Renja OPD Tahun 2019/ (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020 / Tahun Berjalan (n)	Tingkat Realisasi (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= 7+9	11=(10/4)
2	05	XX	20	04	Pengadaan calon induk ikan unggulan	Meningkatnya produksi benih ikan dari UPR dan BBI	450 juta ekor /tahun	428 juta ekor /tahun	425 juta ekor /tahun	441 juta ekor /tahun	100.70	430 juta ekor	430 juta ekor	95,56
2	05	XX	20	05	Revitalisasi Perikanan Budidaya di Kawasan budidaya air tawar	Meningkatnya produksi ikan	61.409,03 ton/ tahun	43.992,5 ton/ tahun	51.218,40 ton/ tahun	44.274,28 ton/ tahun	95.63	56.073,83 ton/ tahun	56.073,83 ton/ tahun	92
2	05	XX	20	06	Pembangunan perikanan terpadu	Meningkatnya Produksi Produk Unggulan Daerah	500.000 ekor	228.000 ekor	350.000 ekor	372.000 ekor	91.22	400.000 ekor	400.000 ekor	80
2	05	XX	20	08	Pengembangan kawasan pendederan ikan unggulan	Meningkatnya luas lahan budidaya	2056,51 Ha	1.652,59 Ha	2.046,51 Ha	20141,51 Ha	80.94	2.051,51 Ha	2.051,51 Ha	99,76
2	05	XX	20	10	Pengendalian dan Pencegahan penebaran penyakit ikan	Berkurangnya penyakit ikan	75%	18%	20%	18%	90.00	15%	71%	94,67
2	05	XX	24		Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Tingkat Produksi Tangkap	4,500	3.702,25 ton/ tahun	4.000 ton/ tahun	3.702,25 ton/ tahun	98.72	4.250 ton /tahun	4.250 ton /tahun	94,45
2	05	XX	24	01	Kajian Kawasan Budidaya laut, air payau dan air tawar	Meningkatnya produksi Perikanan Tangkap	4.500 ton /tahun	3.702,25 ton/ tahun	4.000 ton/ tahun	3.702,25 ton/ tahun	98.72	4.250 ton/ tahun	4.250 ton/ tahun	94,45
2	05	XX	24	02	Pengembangan kawasan pelestarian sumberdaya perikanan	Meningkatnya produksi Perikanan Tangkap	4.500 ton /tahun	3.702,25 ton/ tahun	4.000 ton/ tahun	3.702,25 ton/ tahun	98.72	4.250 ton/ tahun	4.250 ton/ tahun	94,45
2	05	XX	22		Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan	Meningkatnya jumlah kelembagaan profesional bidang perikanan	737 klp	579 kpl	615 klp	615 Klp	102.29	671 klp	671 klp	91

Dari Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan dan Pencapaian Renstra Dinas Perikanan s.d. Tahun 2019 di atas dapat kita lihat bahwa hampir semua program yang telah direncanakan dalam renstra terealisasi, bahkan ada beberapa melebihi target yang sudah direncanakan. Namun ada beberapa program tidak dapat secara maksimal terealisasi, Keterbatasan dan kendala teknis mengakibatkan Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota tidak dapat secara maksimal melaksanakan semua program kerja yang telah direncanakan. Walaupun tingkat pencapaian Target kinerja tersebut termasuk masuk kategori Sangat Baik / Sangat Berhasil, namun perlu ditingkatkan karena belum sesuai dengan yang diharapkan dan direncanakan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan

Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menganalisis Kinerja Pelayanan OPD mengacu pada Indikator Kinerja Utama serta analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas perikanan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perikanan, dengan Tabel sebagai berikut:

Tabel T-C.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Indikator	SPM	IKK	Target				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Jumlah produksi perikanan yang unggul (ton)		Produksi Perikanan									
	- Produksi budidaya (ton)			46,000	46,000	51,218.40	56,073.83	43,991.75	43,992.50	44.274,28	56,073.83	
	- Produksi tangkap (ton)			3,500	3,750	4,000.00	4,250.00	3,500	3,702.25	4,000.00	4,250.00	
	- Produksi benih ikan (ekor)			400,000,000	425,000,000	430,000,000	440,000,000	406,944,570	418,576,450	441.000.000	440,000,000	
	- Produksi ikan hias (ekor)			5,000,000	6,000,000	6,500,000	7,000,000	5,478,000	5,062,000	6,500,000	7,000,000	
	- Produksi Produk Unggulan Daerah (PUD) (ekor)			200,000	250,000	300,000	350,000	185,000	228,000	372	350,000	
	- Produksi hasil olahan perikanan (ton)			350.00	350	375	400	349.02	383.44	375	400	
2.	Tingkat produktifitas perikanan (ton/ha)		Produksi Perikanan	2.5	3	4	5	2.5	3	4	5	
3.	Tingkat konsumsi makan ikan (kg/kapita/tahun)		Konsumsi Ikan	32	33	34	35	32	34	34	35	
4.	Jumlah kelembagaan sektor perikanan yang aktif (unit)			523	566	615	671	523	579	615	671	
5.	Cakupan bina kelompok perikanan (%)			67.5	75	80	85	67.5	70	80	85	

Dinas Perikanan memiliki 5 Indikator Kinerja Utama dengan pencapaian sebagai berikut :

1) JUmlah Produksi Perikanan yang unggul

Produksi Perikanan yang unggul terdiri dari

- Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2019 dari Target 51.218,40 Ton dengan estimasi realisasi 44.274, 28 ton. Realisasi produksi meningkat dari tahun 2018 yaitu 43.992,50 ton . Walaupun masih kurang dari target.
- Produksi perikanan tangkap Tahun 2019 dengan target 4.000 ton realiasi
- Produksi Ikan hias dengan target 6.500.000 ekor, realiasi
- Produksi benih Ikan dengan target 430.000.000, realisasi
- Produksi Produk Unggulan Daerah (PUD) dengan target 300.000 ekor, realiasi
- Produksi Olahan Hasil Perikanan dengan target 375 ton, realisasi....

2) Tingkat Produktifitas perikanan

Tingkat Produktifitas Perikanan Budidaya dengan target yaitu 4 Ton /Ha sudah mencapai target . Peningkatan Produktifitas didukung oleh kegiatan Ektensifikasi dan Intensifikasi. Kegiatan Ektensifikasi Pada tahun 2019 dengan Pemanfaatan Escavator untuk membuka Lahan Baru. Sejak Tahun 2018 terjadi Penambahan Lahan Baru yaitu 11,79 Ha. Selain dari Anggaran APBD Dinas Perikanan juga dengan memanfaatkan dana BUMNAG (Badan Usaha Milik Nagari) untuk kegiatan Perikanan.

Untuk kegiatan Intensifikasi adalah dengan melakukan pembinaan terhadap pembudidaya ikan untuk melaksanakan kegiatan perikanan dari sistem tradisional menjadi intensif dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Kegiatan intensifikasi seperti demplot percontohan, Penerapan

CPIB (Cara pembenihan Ikan yang baik) dan CBIB (Cara Budidaya ikan yang baik) kepada Pembudidaya ikan. Melaksanakan revitalisasi kolam pembudidaya ikan serta keramba jaring apung, keramba sungai, Minapadi, Gerakan Pakan Ikan Mandiri (Gerpari) sehingga bisa menekan harga Pakan ikan dan Menekan penyakit ikan.

3) Tingkat Konsumsi Makan Ikan

Tingkat konsumsi ikan perkapita di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2019 dengan Target 34 Kg/ Kapita / Tahun dan realisasi Tahun 2018 sudah mencapai 34 Kg /kapita/ tahun. Dengan predikat sangat tinggi. Pencapaian yang masih sudah melebihi target yang sudah ditetapkan daerah tetapi masih dibawah target Provinsi dan Nasional.

Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan untuk meningkatkan tingkat konsumsi makan ikan membuat diservikasi produk perikanan seperti seperti bakso ikan, nugget, pizza ikan, peyek ikan, Sozzis Ikan, otak otak ikan. Selain itu dalam upaya meningkatkan konsumsi ikan dan memasyarakatkan makan ikan Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota juga melakukan upaya seperti kegiatan Promosi lewat radio, Gemar Makan Ikan (GEMARIKAN) dan lomba-lomba masak serba ikan

4) Jumlah Kelembagaan Perikanan Sektor Perikanan Yang Aktif

Jumlah Kelompok Perikanan melebihi yaitu dari target 566 kelompok dan realisasi Tahun 2018 adalah 579 kelompok (103%) dengan predikat sangat baik. Kelompok tersebut terdiri dari Pokdakan, Pokmaswas, Poklahsar dan KUB

- Kelompok Pembudidaya ikan (Pokdakan) adalah: Kumpulan para pembudidaya ikan yang terbentuk dan tumbuh atas dasar adanya kepentingan bersama dengan

rasa saling percaya, keserasian dan keakraban untuk bekerjasama dalam rangka memanfaatkan sumberdaya, mengembangkan usaha, dana, untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Pokdakan di Kabupaten Lima puluh kota tersebar di seluruh Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota. Sampai akhir tahun 2018 Pokdakan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 491 kelompok. Kegiatan yang di lakukan oleh Pokdakan adalah usaha pembesaran dan pembenihan ikan.

- Kelompok Pengawas Perikanan (Pokmaswas) adalah Sekelompok masyarakat yang melakukan pengawasan terhadap berlangsungnya pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, baik Usaha Perikanan Tangkap dan Budidaya. Pokmaswas ini tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota . Jumlah Pokmaswas yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 60 Kelompok. Pokmaswas tersebut harus ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
- Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil perikanan (Poklahsar) adalah kelompok pengolah dan/atau pemasaran hasil perikanan yang melakukan kegiatan ekonomi bersama dalam wadah kelompok. Poklahsar yang sudah terdaftar sebanyak 19 Kelompok. Poklahsar baru ada di Kecamatan Harau, Payakumbuh, Mungka, Pangkalan dan Kapur IX. Kegiatan yang dilakukan oleh Poklahsar adalah Pengolahan ikan Asap, Bakso Ikan, Peyek Ikan, Nugget, Burger Ikan, Dendeng Ikan, Pizza Ikan, Sosis Ikan dan Tahu Tuna.
- Kelompok Usaha Bersama (KUB) adalah badan usaha non badan hukum yang berupa kelompok yang dibentuk oleh nelayan berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama

untuk berusaha bersama dan dipertanggung jawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota. KUB yang sudah terdaftar terdapat di sekitar waduk PLTA Koto Panjang Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Kegiatan yang dilakukan oleh KUB adalah melaksanakan penangkapan ikan di Perairan Umum (Waduk PLTA Koto Panjang). Pada Tahun 2018 Nelayan yang tergabung dalam KUB sudah mendapatkan Kartu Asuransi Nelayan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

5) Cakupan Bina Kelompok Perikanan

Cakupan Bina Kelompok Perikanan sudah hampir mencapai target yaitu dari target 75 % tercapai 70 % (94%) dengan predikat sangat Tinggi. Cakupan Bina Kelompok Perikanan adalah persentase kelompok perikanan yang tersentuh oleh program pemerintah baik dana APBD Kabupaten, Dana Alokasi Khusus APBD Provinsi dan Dana APBN. Selain tersentuh oleh bantuan pemerintah pembinaan juga diberikan secara teknis oleh Dinas Perikanan dan Penyuluh Perikanan. Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan adalah menyalurkan bantuan kepada kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) seperti bantuan benih dan pakan, bantuan calon induk ikan, revitalisasi kolam rakyat, pengembangan keramba jaring apung, pengembangan keramba sungai , Minapadi, Bantuan saran dan prasarana, Gerakan pakan ikan mandiri. Bantuan yang disalurkan kepada Kelompok Masyarakat pengawas adalah Pengadaan benih dan pakan untuk lubang larangan, pembangunan shelter, pembangunan pos jaga, pembangunan kolam pembenihan ikan langka. Bantuan yang disalurkan kepada kelompok pengolah dan pemasar (Poklahsar) adalah Pembangunan kios mini pemasaran, pembangunan los pasar ikan, pembangunan bangsal pengolahan, pengadaan alat alat pengolahan, pengadaan alat

alat pemasaran. Sedangkan bantuan yang disalurkan kepada Kelompok usaha bersama (KUB) adalah bantuan perahu, bantuan alat tangkap, asuransi nelayan. Bantuan tersebut sudah disalurkan sejak Dinas Perikanan berdiri tahun 2008. Bantuan yang sudah disalurkan tersebut ada yang berkembang dan ada juga yang tidak berkembang.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan menghadapi permasalahan-permasalahan yang sering terjadi. Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dinas Perikanan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya diantaranya :

1. Rendahnya jumlah produksi perikanan yang unggul
2. Rendahnya tingkat produktivitas perikanan
3. Rendahnya tingkat konsumsi makan ikan
4. Kelompok yang sudah terdaftar di Dinas Perikanan masih banyak yang belum aktif
5. Kurangnya diversifikasi hasil olahan produk perikanan serta belum optimalnya penerapan standarisasi mutu pada hasil olahan produk perikanan
6. Rendahnya cakupan bina kelompok

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan kerangka awal pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah yang didapat yang berhasil dikumpulkan dari Masyarakat, stake holder dan pemerintah sendiri. Rancangan awal RKPD merupakan kunci penting dalam menentukan kualitas seluruh proses penyusunan RKPD. Rancangan awal menginformasikan rancangan kerangka ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, arah prioritas pembangunan daerah dan rencana program dan kegiatan yang dilengkapi dengan rancangan pagu indikatif untuk

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja OPD, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting untuk dilaksanakan karena masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD.

Sebagai salah satu OPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas perikanan berupaya semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan, termasuk salah satunya pada pelaksanaan Musrenbang, baik di tingkat nagari, kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Pada Renja 2021 tidak semua usulan Musrenbang Kecamatan/Nagari bisa kita di tampung karena keterbatasan anggaran yang ada pada Dinas Perikanan. Usulan Musrenbang untuk Dinas Perikanan bersifat bantuan fisik dan bantuan permodalan. Untuk bantuan permodalan kita arahkan kepada dana Hibah yang dikelola oleh Badan Keuangan. Usulan Program dan kegiatan dari masyarakat / Pemangku kepentingan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

TABEL T-C.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2020
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

OPD : DINAS PERIKANAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CTT
1	2	3	5	6	7
I.	PROGRAM : PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN				
	KEGIATAN :				
	1 Pengembangan Bibit Ikan Unggul				
	Sub. Kegiatan				
	- Pengadaan Benih dan Pakan Untuk Pokdakan	Jorong Nagari Gadang	Meningkatnya Produksi Ikan	500 m2	
		Jorong Nagari Gadang	Meningkatnya Produksi Ikan	500 m2	
		Nagari Talang Maur	Meningkatnya Produksi Ikan	334 m2	
		Nagari Andiang	Meningkatnya Produksi Ikan	1000 m2	
		Nagari Simalanggang	Meningkatnya Produksi Ikan	500 m2	
		Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Meningkatnya Produksi Ikan	100 m2	
		Muaro Paiti	Meningkatnya Produksi Ikan	500 m2	
	Pengadaan Benih dan Pakan Untuk Pokdakan	Kelompok Nagari Koto Alam	Meningkatnya Produksi Ikan	1000 m2	
		Kelompok Sejahtera Nagari Lubuak Alai	Meningkatnya Produksi Ikan	1000 m2	
		Jorong Harau Nagari Harau Kec. Harau	Meningkatnya Produksi Ikan	1000 m2	
		Nagari Gunung Malintang	Meningkatnya Produksi Ikan	1000 m2	
		Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban	Meningkatnya Produksi Ikan	1000 m2	
		Mungka, Guguak, dan Akabiluru	Meningkatnya Produksi Ikan	3000 m2	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CTT
1	2	3	5	6	7
		Mungka, Guguak, dan Akabiluru	Meningkatnya Produksi Ikan	300 m2	
		Mungka, Guguak, dan Akabiluru	Meningkatnya Produksi Ikan	300 m2	
		Jorong Harau Nagari Harau Kec. Harau	Meningkatnya Produksi Ikan	1000 m2	
		Durian Tinggi Kec. Kapur IX	Meningkatnya Produksi Ikan	1000 m2	
		Lubuak Alai Kec. Kapur IX	Meningkatnya Produksi Ikan	1000 m2	
		Kecamatan Mungka	Meningkatnya Produksi Ikan	100 m2	
	2 Pengadaan Calon Induk Ikan Unggulan				
	Sub. Kegiatan				
	Bantuan calon induk ikan mas dari Jawa Barat Jantan dan Betina	Nagari Gunung Malintang	Meningkatnya Produksi Ikan	50 kg	
	3 Revitalisasi perikanan budidaya di kawasan budidaya				
	Sub. Kegiatan				
	- Pembangunan/Rehabilitasi kolam pembenihan pokdakan	Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban	Meningkatnya Produksi Ikan	50 m2	
	- Revitalisasi Kolam Ikan	Nagari Talang Maur	Meningkatnya Produksi Ikan	1 paket	
	4 Pembangunan Perikanan Terpadu				
	Sub. Kegiatan				
	- Tersedianya calon Induk gurami sago	Kolam Pokdakan Nagari Durian Tinggi	Meningkatnya produksi Ikan gurami Sago	1 Paket	
		Kelompok Sehati Nagari Balai Panjang Kec. Lareh Sago Halaban	Meningkatnya produksi Ikan gurami Sago	1 Paket	
	5 Pengembangan kawasan pendederan ikan unggulan				
	Sub kegiatan				
	- Rehab Kolam Pokdakan	Nagari Gunung Malintang	Terehabnya kolam Pokdakan	50 m2	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CTT
1	2	3	5	6	7
II	PROGRA : PENGEMBANGAN SISNTEM PENYULUH KEGIATAN				
	2 Kajian Sistem penyuluhan Perikanan				
	Sub kegiatan				
	- Kajian sistem penyuluhan perikanan	Nagari Talang Maur	Meningkatnya Produksi Ikan	1 Paket	
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA LAUT, AIR PAYAU DAN AIR TAWAR				
	KEGIATAN				
	4 Kajian Kawasan Budidaya Laut, Payau dan Air Tawar				
	Sub Kegiatan				
	- Pengadaan Pakan dan Benih untuk Perairan Umum	Pokmaswas Labu Ompong Sungai Batang Kapur	Meningkatkan Produksi tangkap	1000 m2	
		Kec. Mungka	Meningkatnya Produksi Tangkap	1000 m2	
	- Bantuan alat tangkap ikan dan perahu	Kelompok Muaro Siknambun	Meningkatnya Produksi Tangkap	2 unit	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan Nasional tahun 2020, memuat Tema RKP Tahun 2020 adalah :

“Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas’.”

Ada lima prioritas nasional dalam RKP 2020 yaitu:

- 1) Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;
- 2) Infrastruktur dan pemerataan wilayah
- 3) Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja; ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup;
- 4) Stabilitas pertahanan dan keamanan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perikanan

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut:

A. Tujuan

Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha di Bidang Perikanan dengan memanfaatkan potensi perikanan

B. Sasaran

- 1) Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan yang unggul
- 2) Meningkatnya jumlah pelaku usaha dan pelaku utama di Bidang Perikanan yang aktif
- 3) Meningkatnya Konsumsi Makan Ikan

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Terkait dengan program ini maka program dan kegiatan Dinas Perikanan dikelompokkan ke dalam 2 bagian, yaitu program dan kegiatan pada setiap OPD yang merupakan program dan kegiatan yang bersifat rutin, dan program kegiatan pilihan yang terkait dengan urusan pilihan Perikanan. Ringkasan Program dan Kegiatan Dinas Perikanan pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 3.1
Program dan kegiatan yang ada pada setiap OPD

No	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ol style="list-style-type: none">1. Penyediaan jasa surat menyurat2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3. Penyediaan jasa administrasi keuangan4. Penyediaan alat tulis kantor5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor7. Penyediaan jasa surat menyurat8. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik9. Penyediaan jasa administrasi keuangan10. Penyediaan alat tulis kantor11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

		<p>14. Penyediaan peralatan rumah tangga</p> <p>15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</p> <p>16. Penyediaan makanan dan minuman</p> <p>17. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah</p>
NO	PROGRAM	KEGIATAN
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	<p>1. Pengadaan kendaraan Dinas Operasional</p> <p>2. Pengadaan Mobileur</p> <p>3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</p> <p>4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</p> <p>5. Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor</p>
3.	Peningkatan disiplin aparatur	<p>1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</p> <p>2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</p>
4.	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	<p>1. Pendidikan dan pelatihan formal</p> <p>2. Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan</p>
5.	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	<p>1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</p> <p>2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun</p>

Tabel 3.2
Program dan Kegiatan lingkup Urusan Pilihan Perikanan

No	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Bibit Ikan Unggul 2. Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya 3. Pengadaan Calon Induk Ikan Unggul 4. Revitalisasi Perikanan Budidaya di Kawasan Budidaya Air Tawar 5. Pembangunan Budidaya Perikanan Terpadu 6. Pengembangan Kawasan Pendederan Ikan Unggulan 7. Pengembangan Bibit Ikan Unggul 8. Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya 9. Pengadaan Calon Induk Ikan Unggul 10. Revitalisasi Perikanan Budidaya di Kawasan Budidaya Air Tawar 11. Pembangunan Budidaya Perikanan Terpadu 12. Pengembangan Kawasan Pendederan Ikan Unggulan 13. Pengendalian dan Pecegahan Penebaran penyakit ikan.
2	Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	Kajian sistem penyuluhan perikanan
3	Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 2. Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

NO	PROGRAM	KEGIATAN
		3. Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan
4	Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, air Payau dan Air Tawar	1. Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar 2. Pengembangan Kawasan dan Pelestarian Sumberdaya Ikan

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2021 Dinas Perikanan melaksanakan 9 program dengan 35 kegiatan.

Tabel T-C.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPd tahun 2021 Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama OPD : Dinas Perikanan

No	Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	11	12
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tingkat Kelancaran administrasi Perkantoran	20%	885,575	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tingkat Kelancaran administrasi Perkantoran	20%	885,575	
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	Diskan	% Penyediaan Jasa surat menyurat	20%	4,050	Penyediaan jasa surat menyurat	Diskan	% Penyediaan Jasa surat menyurat	20%	4,050	
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Diskan	% Jumlah Penyediaan kebutuhan air, listrik, telepon dan internet	20%	45,000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Diskan	% Jumlah Penyediaan kebutuhan air, listrik, telepon dan internet	20%	45,000	
3.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Diskan	% Jumlah honorarium pengelola kegiatan, Honor PHL, uang lembur dan biaya Monev	20%	450,000	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Diskan	% Jumlah honorarium pengelola kegiatan, Honor PHL, uang lembur dan biaya Monev	20%	450,000	
4.	Penyediaan alat tulis kantor	Diskan	% Jumlah alat tulis Kantor	20%	45,000	Penyediaan alat tulis kantor	Diskan	% Jumlah alat tulis Kantor	20%	45,000	
1.	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Diskan	% Jumlah Barang cetak dan pengadaan	20%	33,525	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Diskan	% Jumlah Barang cetak dan pengadaan	20%	33,525	
2.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Diskan	%Jumlah alat alat listrik dan elektronik	20%	3,500	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Diskan	%Jumlah alat alat listrik dan elektronik	20%	3,500	
3.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Diskan	% Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	20%	60,000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Diskan	% Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	20%	60,000	
4.	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Diskan	% Jumlah alat alat rumah tangga	20%	3,950	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Diskan	% Jumlah alat alat rumah tangga	20%	3,950	
5.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Diskan	% jumlah Buku Buku Teknis perikanan, Peraturan Perundang undangan dan tersdianya koran, majalah	20%	4,800	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Diskan	% jumlah Buku Buku Teknis perikanan, Peraturan Perundang undangan dan tersdianya koran, majalah	20%	4,800	
1.	Penyediaan makanan dan minuman	Diskan	Jumlah rapat-rapat dinas	20%	35,750	Penyediaan makanan dan minuman	Diskan	Jumlah rapat-rapat dinas	20%	35,750	
2.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Diskan	Jumlah biaya operasional perlanan dinas	20%	200,000	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Diskan	Jumlah biaya operasional perlanan dinas	20%	200,000	
II	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Diskan	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	20%	834,425	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Diskan	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	20%	834,425	
2.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Diskan	Jumlah Penyediaan kendaraan Dinas roda 4	1 unit	403,625	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Diskan	Jumlah Penyediaan kendaraan Dinas roda 4	1 unit	403,625	
2.2	Pengadaan mebeleur	Diskan	% Jumlah Mobiler Kantor	20%	72,500	Pengadaan mebeleur	Diskan	% Jumlah Mobiler Kantor	20%	72,500	
2.3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Diskan	Jumlah biaya operasional kendaraan dinas (8 Kendaraan roda 4 dan 47 kendaraan roda 2)	20%	175,000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Diskan	Jumlah biaya operasional kendaraan dinas (8 Kendaraan roda 4 dan 47 kendaraan roda 2)	20%	175,000	
2.4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Diskan	% perawatan gedung kantor	20%	81,000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Diskan	% perawatan gedung kantor	20%	81,000	
2.5	Rehabilitasi sedang/berat Gedung kantor	Diskan	Jumlah rehab kantor dinas perikanan	20%	102,300	Rehabilitasi sedang/berat Gedung kantor	Diskan	Jumlah rehab kantor dinas perikanan	20%	102,300	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	11	12
VII	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan		Cakupan Bina Kelompok	85%	443,425	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan		Cakupan Bina Kelompok	85%	443,425	
7.1	Kajian Sistem Penyuluh Perikanan	Kab. Lima Puluh Kota	Cakupan Bina Kelompok	85%	443,425	Kajian Sistem Penyuluh Perikanan	Kab. Lima Puluh Kota	Cakupan Bina Kelompok	85%	443,425	
VIII	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan		Tingkat konsumsi makanan dan meningkatnya nilai tambah dan daya saing Produk Perikanan	35 kg/kapita/tahun	1,112,525	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan		Tingkat konsumsi makanan dan meningkatnya nilai tambah dan daya saing Produk Perikanan	35 kg/kapita/tahun	1,112,525	
8.1	Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Kab. Lima Puluh Kota	Meningkatnya konsumsi makanan	35 kg/kapita/Tahun, 400 ton/tahun	577,770	Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Kab. Lima Puluh Kota	Meningkatnya konsumsi makanan	35 kg/kapita/Tahun, 400 ton/tahun	577,770	
8.2	Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan	Kab. Lima Puluh Kota	Meningkatnya jumlah produksi Hasil Olahan	400 ton/ tahun	428,950	Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan	Kab. Lima Puluh Kota	Meningkatnya jumlah produksi Hasil Olahan	400 ton/ tahun	428,950	
8.3	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan	Kab. Lima Puluh Kota	Meningkatnya jumlah produksi Hasil Olahan olahan	400 ton/ tahun	105,805	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan	Kab. Lima Puluh Kota	Meningkatnya jumlah produksi Hasil Olahan olahan	400 ton/ tahun	105,805	
IX	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar		Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	4.250 Ton/ Tahun	1,029,850	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar		Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	4.250 Ton/ Tahun	1,029,850	
9.1	Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air tawar	Kab. Lima Puluh Kota	Meningkatnya hasil produksi perikanan tangkap	4.250 ton	732,050	Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air tawar	Kab. Lima Puluh Kota	Meningkatnya hasil produksi perikanan tangkap	4.250 ton	732,050	
9.2	Pengembangan Kawasan Pelestarian Sumberdaya Ikan	Kab. Lima Puluh Kota	Meningkatnya hasil produksi perikanan tangkap	4.250 ton	297,800	Pengembangan Kawasan Pelestarian Sumberdaya Ikan	Kab. Lima Puluh Kota	Meningkatnya hasil produksi perikanan tangkap	4.250 ton	297,800	
JUMLAH TOTAL					8,700,000	JUMLAH TOTAL					8,700,000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 RENCANA KERJA

Penetapan Rencana Kerja Dinas Perikanan tahun 2021 mengacu kepada program dan kegiatan yang ada dalam RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021. Adapun pencantuman nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Permendagri No. 13 tahun 2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2008 serta Permendagri No. 21 tahun 2011.

4.2. PENDANAAN

Untuk pendanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan pada Tahun 2020, berasal dari dana APBD Kabupaten dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kelautan dan Perikanan RI. Mengenai uraian kegiatan berikut target kinerja dan indikasi anggaran program dan kegiatan Dinas Perikanan Tahun 2020 secara lengkap dapat dibaca pada Tabel 4.1

Tabel TC 5
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERIKANAN TAHUN 2021
 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

OPD : Dinas Perikanan
 Kabupaten : Lima Puluh Kota

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2022	
				Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12
X XX XX 01	Program PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat kelancaran Administrasi Perkantoran		20 %	885,575,000			20 %	986,500,000
	Kegiatan								
X XX XX 01 01	1. Penyediaan Jasa surat menyurat	% Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perikanan	20 %	4,050,000	APBD Kab.	Sesuai dengan Perda No 15 Tahun 2016 dan Perbub Nomor 16 Tahun 2016	20 %	8,000,000
X XX XX 01 02	2. Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	% Jumlah penyediaan kebutuhan air , listrik, telepon dan internet	Dinas Perikanan	20 %	45,000,000	APBD Kab.	Sesuai dengan Perda No 15 Tahun 2016 dan Perbub Nomor	20 %	45,000,000
X XX XX 01 07	3. Penyediaan jasa Administrasi keuangan	Tersedianya honorarium pengelola kegiatan, Honor PHL, uang lembur dan biaya Monev	Dinas Perikanan	20 %	450,000,000	APBD Kab.	Sesuai dengan Perda No 15 Tahun 2016 dan Perbub Nomor 16 Tahun 2016	20 %	500,000,000
X XX XX 01 10	4. Penyediaan alat tulis kantor	% Jumlah alat tulis Kantor	Dinas Perikanan	20 %	45,000,000	APBD Kab.	Sesuai dengan Perda No 15 Tahun 2016 dan Perbub Nomor 16 Tahun 2016	20 %	50,000,000
X XX XX 01 11	5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	% Jumlah Barang cetak dan penggandaan	Dinas Perikanan	20 %	33,525,000	APBD Kab.	Sesuai dengan Perda No 15 Tahun 2016 dan Perbub Nomor 16 Tahun 2016	20 %	50,000,000
X XX XX 01 12	6. Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	% Jumlah alat-alat listrik dan elektronik	Dinas Perikanan	20 %	3,500,000	APBD Kab.	Sesuai dengan Perda No 15 Tahun 2016 dan Perbub Nomor 16 Tahun 2016	20 %	3,500,000
X XX XX 01 13	7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	% Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Perikanan	20 %	60,000,000	APBD Kab.	Sesuai dengan Perda No 15 Tahun 2016 dan Perbub Nomor 16 Tahun 2016	20 %	60,000,000
X XX XX 01 14	8. Penyediaan peralatan rumah tangga	% Jumlah alat alat rumah tangga	Dinas Perikanan	20 %	3,950,000	APBD Kab.	Sesuai dengan Perda No 15 Tahun 2016 dan Perbub Nomor 16 Tahun 2016	20 %	4,000,000
X XX XX 01 15	9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	% jumlah Buku Buku Teknis perikanan, Peraturan Perundang undangan dan tersedianya koran, majalah	Dinas Perikanan	20 %	4,800,000	APBD Kab.	Sesuai dengan Perda No 15 Tahun 2016 dan Perbub Nomor 16 Tahun 2016	20 %	5,000,000
X XX XX 01 17	10. Penyediaan makan minum	- Terlaksananya rapat-rapat dinas	Dinas Perikanan	20 %	35,750,000	APBD Kab.	Sesuai dengan Perda No 15 Tahun 2016 dan Perbub Nomor 16 Tahun 2016	20 %	36,000,000
X XX XX 01 18	11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Tersedianya biaya operasional perjalanan dinas	Dinas Perikanan	20 %	200,000,000	APBD Kab.	Sesuai dengan Perda No 15 Tahun 2016 dan Perbub Nomor 16 Tahun 2016	20 %	225,000,000
X XX XX 02	Program PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APRATUR	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur		20 %	834,425,000	0		20 %	485,000,000
	Kegiatan								
X XX XX 02 05	1. Pengadaan kendaraan Dinas	- Tersedia kendaraan dinas roda 4	Dinas Perikanan	1 unit	403,825,000	APBD Kab.	Sesuai dengan Perda No 15 Tahun 2016 dan Perbub Nomor 16 Tahun 2016	1 Paket	
X XX XX 02 10	1. Pengadaan Mobileur	% Jumlah Mobiler Kantor	Dinas Perikanan	25 %	72,500,000	APBD Kab.	Sesuai dengan Perda No 15 Tahun 2016 dan Perbub Nomor 16 Tahun 2016	35 %	75,000,000
X XX XX 02 24	2. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas	Tersedianya biaya operasional kendaraan dinas (8 unit Kend roda 4, 47 kendaraan roda 2)	Dinas Perikanan	20 %	175,000,000	APBD Kab.	Sesuai dengan Perda No 15 Tahun 2016 dan Perbub Nomor 16 Tahun 2016	20 %	200,000,000
X XX XX 02 26	3. Pemeliharaan rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya perawatan gedung kantor Jumlah Jasa Kantor (Petugas cleniang service)	Dinas Perikanan Dinas Perikanan	20 %	81,000,000	APBD Kab.	Sesuai dengan Perda No 15 Tahun 2016 dan Perbub Nomor 16 Tahun 2016	20 %	85,000,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2022	
				Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12
X XX XX 02 42	4. Rehabilitasi Sedang berat / Gedung kantor	- Terehabnya kantor dinas perikanan (Rehab Ringan) dan Terlaksananya Perawatan gedung Kantor	Dinas Perikanan	20 %	102,300,000	APBD Kab.	Sesuai dengan Perda No 15 Tahun 2016 dan Perbub Nomor 16 Tahun 2016	20 %	125,000,000
X XX XX 03	Program PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Tingkat disiplin aparatur		150 Stel	50,000,000	- 0		150 Stel	90,000,000
	Kegiatan								
X XX XX 03 02	1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	- Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	Dinas Perikanan	75 stel	25,000,000	APBD Kab.	Sesuai dengan Perda No 15 Tahun 2016 dan Perbub Nomor 16 Tahun 2016	80 stel	45,000,000
X XX XX 03 05	2. Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	- Tersedianya pakaian Hitam Putih	Dinas Perikanan	75 stel	25,000,000	APBD Kab.	Sesuai dengan Perda No 15 Tahun 2016 dan Perbub Nomor 16 Tahun 2016	80 stel	45,000,000
X XX XX 05	Program PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		20 %	40,000,000	-		20 %	50,000,000
	Kegiatan								
X XX XX 05 01	1. Pendidikan dan Pelatihan formal	- Terlaksananya Peningkatan SDM Aparatur, - Terikutinya bimtek barang/ jasa pemerintah - Terikutinya bimtek keuangan - Terikutinya bimtek kepegawaian (biaya disesuaikan dengan permintaan lembaga penyelenggara)	Dinas Perikanan	20 %	25,000,000	APBD Kab.	Sesuai dengan Perda No 15 Tahun 2016 dan Perbub Nomor 16 Tahun 2016	20 %	30,000,000
X XX XX 05 02	2. Sosialisasi Peraturan perundang undangan	- Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang undangan	Dinas Perikanan	20 %	15,000,000	APBD Kab.	Sesuai dengan Perda No 15 Tahun 2016 dan Perbub Nomor 16 Tahun 2016	20 %	20,000,000
X XX XX 06	Program PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN DAN CAPAIAN KINERJA	Tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan		8 Dokumen	100,000,000	-		8 DOK	100,000,000
	Kegiatan								
X XX XX 06 01	1. Penyampaian laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi dan kinerja SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan dan Laporan - Tersusunnya Renja Dinas Perikanan - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Perikanan - Penyusunan Laporan Tahunan - Penyusunan Laporan Kegiatan - Penyusunan LAKIP - Penyusunan RKA dan DPA Dinas Perikanan - Tersedianya data statistik perikanan - Tersusunnya evaluasi renstra	Dinas Perikanan	7 Dokumen 1 Paket bulan 12 1 buah 12 bulan 1 buah 4 buah 13 kec 1 buah	75,000,000	APBD Kab.	Sesuai dengan Perda No 15 Tahun 2016 dan Perbub Nomor 16 Tahun 2016	7 Dokumen	75,000,000
X XX XX 06 04	2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dinas Perikanan	1 Dokumen	25,000,000	APBD Kab.	Sesuai dengan Perda Nomor 15 Tahun 2016 dan Perbub Nomor	1 Dokumen	25,000,000
2	Urusan Pilihan								
2 05	Kelautan dan Perikanan								
2 05 XX 20	Program PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	Tingkat produksi Perikanan yang unggul		56.073,83 ton/ tahun, 350 juta	4,204,200,000			61.409,03 ton/ tahun, 375 juta	4,570,290,000
2 05 XX 20 01	Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Meningkatnya produksi ikan			685,364,000	APBD Kab.	Sesuai dengan Perda Nomor 15 Tahun 2016 dan Perbub Nomor 16 Tahun 2016		753,900,400
		Tersedianya pakan BBI	Dinas Perikanan	1 Paket	50,000,000			1 Paket	55,000,000
		Tersedianya pakan tambahan untuk BBI (pupuk kandang, kapur dan dedak)	Dinas Perikanan	1 Paket	15,000,000			1 Paket	16,500,000
		Tersedianya peralatan pembenihan untuk BBI	Dinas Perikanan	3 Paket	15,000,000			3 Paket	16,500,000
		Tersedianya pakaian kerja lapangan untuk petugas BBI	Dinas Perikanan	8 Paket	10,000,000			8 Paket	11,000,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2022	
				Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12
		Tersedianya Honorarium petugas BBI	Dinas Perikanan	3,036 OH	182,160,000			3036 OH	200,376,000
		Tersedianya Honorarium pengimput data benih	Dinas Perikanan	276 OH	16,560,000			276 OH	18,216,000
		Tersedianya dana penunjang kegiatan (Honor Panitia, Administrasi Tender, Fotocopy, Materai, Makan Minum)	Dinas Perikanan	23 Paket	12,094,000			23 Paket	13,303,400
		Tersedianya dana CPCL, Monev dan Pembinaan	Kab. Lima Puluh Kota	1 paket	27,550,000			1 paket	30,305,000
		Terlaksananya surveillance Kegiatan CBIB	Kab. Lima Puluh Kota	1 paket	5,000,000			1 paket	5,500,000
		Tersedianya peralatan hatchery indoor	Dinas perikanan	1 Paket	10,000,000			1 Paket	11,000,000
		Tersedianya Benih dan Pakan untuk Nagari Mandiri Pangan	- Nagari Harau Kecamatan Harau	2 Paket	57,000,000			1 Paket	62,700,000
		Tersedianya benih ikan nila, peralatan dan pakan untuk Pokdakan	- Pokdakan Mukhlisin Nagari Limbanang Kec. Suliki	10 paket	285,000,000			9 paket	313,500,000
			- Pokdakan BP Berkarya Nagari Pandam Gadang Kec. Gunung Omeh						
			- Pokdakan Andam Saiyo Nagari Sungai Rimbang Kec. Suliki						
			- Pokdakan Karya Saiyo Nagari Baruah Gunung Kec. Bukik Barisan						
			- Pokdakan Muda Saiyo Nagari Lubuk Batingkok Kec. Harau						
			- Pokdakan Batang Sungai Nagari Gurun Kec. Harau						
			- Pokdakan Ganesha mandiri Nagari Persiapan Ulu Aia Kec. Harau						
			- Pokdakan Tunas Muda Nagari Simalanggang Kec. Payakumbuh						
			- Pokdakan Berkat Benih Nagari Koto Tinggi Kec. Gunung Omeh						
			- Pokdakan Malayu Sarangkuah Dayuang Nagari Balai Panjang Kec. Lareh Sago Halaban						
									-
2 05 XX 20 02	Kegiatan Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	Meningkatnya jumlah kelembagaan profesional bidang perikanan		671 klp	387,382,000	APBD Kab.	Sesuai dengan Perda Nomor 15 Tahun 2016 dan Perbub Nomor	737 klp	392,790,200
		Tersedianya honor PPTK dan Asisten PPTK	Kab. Lima Puluh Kota	12 bulan	30,300,000			12 bulan	33,330,000
		Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kelembagaan Perikanan	Kab. Lima Puluh Kota	13 Kali	46,075,000			13 Kali	50,682,500
		Terlaksananya Pelatihan Budidaya Ikan Gurami	Kab. Lima Puluh Kota	3 Kali	17,963,000			3 Kali	19,759,300
		Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Perikanan	Kab. Lima Puluh Kota	3 Kali	18,025,000			3 Kali	19,827,500
		Terlaksananya sosialisasi Pra Sehatkan	Kab. Lima Puluh Kota	1 Kali	9,515,000			1 Kali	10,466,500
		Terlaksananya Sosialisasi Penggunaan Probiotik	Kab. Lima Puluh Kota	1 kali	8,070,000			1 kali	8,877,000
		Terlaksananya Sosialisasi Pembentukan Asosiasi Perikanan	Kab. Lima Puluh Kota	1 kali	6,575,000			1 kali	7,232,500
		Terlaksananya sosialisasi Peningkatan Jaringan sistem pemasaran Pedagang Ikan	Kab. Lima Puluh Kota	1 kali	5,290,000			1 kali	5,819,000
		Sosialisasi Pedagang Ikan Tradisional menuju pasar sehat	Kab. Lima Puluh Kota	2 kali	10,090,000			2 kali	11,099,000
		Sosialisasi Gemanakan Bagi anak PAUD / TK/SD	Kab. Lima Puluh Kota	1 kali	5,250,000			1 kali	5,775,000
		Sosialisasi Kajian Pengaruh sumberdaya manusia, kesadaran lingkungan	Kab. Lima Puluh Kota	1 kali	13,875,000			1 kali	15,262,500

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2022	
				Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12
		Sosialisasi Bantuan premi asuransi Nelayan	Kab. Lima Puluh Kota	1 kali	13,925,000			1 kali	15,317,500
		Bimtek Temu Usaha Pembudidaya dan Pedagang Ikan	Kab. Lima Puluh Kota	1 kali	6,850,000			1 kali	7,535,000
		Bimtek cara pembenihan ikan yang baik	Kab. Lima Puluh Kota	1 kali	6,293,000			1 kali	6,922,300
		Bimtek cara Budidaya Ikan yang baik (CBIB)	Kab. Lima Puluh Kota	1 kali	7,068,000			1 kali	7,774,800
		Bimbingan teknis budidaya Ikan air tawar	Kab. Lima Puluh Kota	1 kali	7,568,000			1 kali	8,324,800
		Bimtek cara pembuatan pakan yang baik (CPPIB)	Kab. Lima Puluh Kota	1 kali	8,270,000			1 kali	9,097,000
		Bimtek temu usaha kemitraan	Kab. Lima Puluh Kota	1 kali	5,648,000			1 kali	6,212,800
		Bimtek Pengendalian HPI dan OIKB	Kab. Lima Puluh Kota	1 kali	9,020,000			1 kali	9,922,000
		Bimtek Pengendalian dan Pengawasan Mutu	Kab. Lima Puluh Kota	1 kali	5,925,000			1 kali	6,517,500
		Bimtek masak serba ikan	Kab. Lima Puluh Kota	2 kali	8,150,000			2 kali	8,965,000
		Tersedianya Sarana Prasarana Pendukung Pusat Pelatihan Perikanan di Gapokkan Mungo Gurami Lestari	Nagari Mungo Kec. Luak	1 Paket	30,000,000			1 Paket	33,000,000
		Terlaksananya Monev dan Pembinaan Kelembagaan Sektor Perikanan	Kab. Lima Puluh Kota	12 bulan	50,987,000			12 bulan	56,085,700
		Terlaksananya pendampingan kelembagaan Perikanan	Kab. Lima Puluh Kota	12 bulan	56,650,000			12 bulan	62,315,000
2 05 XX 20 04	Pengadaan Calon Induk Ikan Unggulan	Meningkatnya produksi benih ikan dari UPR dan BBI			493,707,000	APBD Kab.	Sesuai dengan Perda Nomor 15 Tahun 2016 dan Perbub Nomor		543,077,700
		Tersedianya honorarium pelaksana kegiatan	Dinas Perikanan	12 OB	30,300,000			12 OB	33,330,000
		Tersedianya dana penunjang kegiatan (Honor Panitia, Administrasi Tender, Fotocopy, Materai, BBM)	Dinas Perikanan	12 bulan	12,607,000			12 bulan	13,867,700
		Tersedianya Jumlah pakan induk dan pakan tambahan untuk BBI	BBI Taratang, BBI Tanjung Balik, BBI Aia Putih	3 paket	45,000,000			3 paket	49,500,000
		Tersedianya Jumlah Bahan Baku Pakan BBI	BBI Taratang, BBI Tanjung Balik, BBI Aia Putih	1 paket	25,000,000			1 paket	27,500,000
		Tersedianya dana untuk CPCL, monev dan pembinaan	Kab. Lima Puluh Kota	1 paket	10,000,000			1 paket	11,000,000
		Terlaksananya kegiatan surveillance CPIB bagi UPR	Kab. Lima Puluh Kota	12 Bulan	7,000,000			12 Bulan	7,700,000
		Tersedianya calon induk ikan nila unggul dan pakan untuk Nagari Mandiri Pangan	Pokdakan Nagari Harau Kec. Harau	2 paket	160,000,000			2 paket	176,000,000
		Tersedianya Calon Induk Ikan Unggul untuk Hatchery Ikan Hias	Dinas Perikanan	1 Paket	123,800,000			1 Paket	136,180,000
		Tersedianya Calon Induk Ikan Unggul dan pakan untuk BBI (DAK)	BBI Taratang, BBI Tanjung Balik, BBI Aia Putih	2 Paket	80,000,000			2 Paket	88,000,000
2 05 xx 20 05	Kegiatan Revitalisasi Perikanan Budidaya di Kawasan Budidaya Air Tawar	Terlaksananya Revitalisasi Kolam Rakyat			450,000,000	APBD Kab.	Sesuai dengan Perda Nomor 15 Tahun 2016 dan Perbub Nomor		474,000,000
		Pengadaan Benih dan Pakan	1. Pokdakan Sakinah Nagari Andiang Kecamatan Suliki	4 Paket	160,000,000			4 Paket	165,000,000
			2. Harapan Mulya Lubuak Tabuan Nagari Pangkalan Kec. Pangkalan						
			3. Tigo Alua Saiyo Jorong Lubuak Simato Nagari Sungai Antuan Kec. Mungka						
			4. Maju Bersama Nagari Koto Baru Simalanggang Kec. Payakumbuh						

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2022	
				Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12
		Pembangunan/Rehabilitasi Kolam Rakyat dan penunjang kegiatan	1. Pokdakan Family Bersatu Nagari Koto Baru Simalanggang Kec. Payakumbuh	2 Paket	180,000,000			2 Paket	185,000,000
			2. Pokdakan Malayu Sarangkuan Dayuang Nagari Balai Panjang Kec. LSH						
		Terlaksananya pemberdayaan potensi perairan umum (Pengadaan sarana perbaikan KJA, Benih dan Pakan)	Pokdakan Panawar Jorong sipingai Nagari VII Koto Talago Kec. Guguk	1 Paket	40,000,000			1 Paket	45,000,000
		Tersedianya honor dan penunjang kegiatan	Kab.Lima Puluh Kota	12 Bulan	30,000,000			12 Bulan	30,000,000
		Terlaksananya Dana Kegiatan untuk CPCL Pembinaan dan Money Kegiatan	Kab.Lima Puluh Kota	12 Bulan	20,000,000			12 Bulan	25,000,000
		Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke propinsi dan pusat		12 Bulan	20,000,000			12 Bulan	24,000,000
2 05 xx 20 06	Kegiatan Pembangunan Perikanan Budidaya Terpadu	Terlaksananya pembangunan perikanan budidaya secara terpadu dan berkisnambungan			344,352,000	APBD Kab.	Sesuai dengan Perda Nomor 15 Tahun 2016 dan Perbub Nomor 16 Tahun 2016		378,787,200
		Tersedianya calon induk ikan Gurami Sago	1. Pokdakan Baromban Indah Nagari Swayan Kec.	1 Paket	186,000,000			1 Paket	204,600,000
			2. Pokdakan Gurami Mas Nagari Bukik Sikumpa Kec. Lareh Sago Halaban	1 Paket				1 Paket	
			3. Pokdakan Muda Karya Nagari Mungo Kec. Luak	1 Paket				1 Paket	
		Terlaksananya pembangunan Rehap/Pembangunan Kolam Induk Ikan Gurami Sago	Pokdakan Baliak Rawang Nagari Koto Tengah Simalanggang	1 Paket	94,000,000			1 Paket	103,400,000
		Tersedianya Honor dan Penunjang Kegiatan	Kab. Lima Puluh Kota	12 Bulan	17,180,000			12 Bulan	18,898,000
		Terlaksananya dana kegiatan untuk CPCL, Pembinaan dan Money Kegiatan	Kab. Lima Puluh Kota	12 Bulan	27,570,000			12 Bulan	30,327,000
		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Propinsi dan Pusat	Kab. Lima Puluh Kota	12 Bulan	17,102,000			12 Bulan	18,812,200
		Tersedianya x Banner Ikan Gurami Sago	Kab. Lima Puluh Kota		2,500,000				
				1 Unit				1 Unit	2,750,000
2 05 XX 20 08	Pengembangan Kawasan Pendederan Ikan Unggulan	Meningkatnya Luas Lahan Budidaya			1,740,485,000	APBD Kab.	Sesuai dengan Perda Nomor 15 Tahun 2016 dan Perbub Nomor 16 Tahun 2016		1,914,533,500
		Terlaksananya Ekstensifikasi kolam baru untuk Pokdakan	Pokdakan Harapan Mulya Nagari Pangkalan Kec.	20 M2	40,000,000			1 Paket 20 M2	44,000,000
		Tersedianya Dana Monitoring dan evaluasi Kegiatan serta CPCL Kegiatan	Kab. Lima Puluh Kota	12 bulan	15,000,000			12 bulan	16,500,000
		Tersedianya Honor Operator Excavator	Dinas Perikanan	264 OH	15,840,000			264 OH	17,424,000
		Tersedianya Honor penginput data kawasan budidaya	Dinas Perikanan	264 OH	15,840,000			264 OH	17,424,000
		Pembangunan /rehabilitasi kolam induk BBI Aia Putih (DAK)	BBI Aia Putih	288.85 M2	722,121,900			317.73 M2	794,334,090
		Pembangunan /rehabilitasi kolam pendederan BBI Aia Putih (DAK)	BBI Aia Putih	205.82 M2	514,542,000			226.4 M2	565,996,200
		Tersedianya dana penunjang DAK (Honor perencana teknis, honor pengawas)	BBI Aia Putih	2 paket	69,298,100			2 paket	76,227,910
		Terlaksananya pembangunan/pengadaan jalan lingkung kolam BBI Aia Putih	BBI Aia Putih	1 paket	180,000,000			1 paket	198,000,000
		Terlaksananya rehabilitasi kolam/saluran BBI Tarantang	BBI Tarantang	2 Paket	40,400,000			2 Paket	44,440,000
		Tersedianya dana penunjang DAU (Honor perencana teknis, honor pengawas, pejabat pengadaan, PPHP, BBM, Fotocopy, Makan minum)	Dinas Perikanan	2 paket	70,893,000			2 paket	77,982,300

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2022	
				Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12
		Tersedianya dana Konsultasi dan Koordinasi Kegiatan	Luar Kabupaten	1 Paket	37,000,000			1 Paket	40,700,000
		Tersedianya dana survey lokasi pemanfaatan excavator dan kegiatan Pra-SetHatKan	Kab. Lima Puluh Kota	1 Paket	19,550,000			1 Paket	21,505,000
2 05 XX 20 10	Pengendalian dan pencegahan Penebaran Penyakit Ikan	Berkurangnya penyakit ikan			102,910,000	APBD Kab.	Sesuai dengan Perda Nomor 15 Tahun 2016 dan Perbub Nomor 16 Tahun 2016		113,201,000
		Teridentifikasi sampel ikan sakit dan pakan	Luar Kabupaten	1 Paket	4,000,000			1 Paket	4,400,000
		Tersedianya dana penunjang kegiatan(Fotocopy, materai, BBM dan makan minum)	Dinas Perikanan	12 bulan	4,760,000			12 bulan	5,236,000
		Tersedianya leaflet HPI , obat ikan dan probiotik	Pokdakan	3 paket	9,000,000			3 paket	9,900,000
		Tersedianya obat-obatan ikan untuk pokdakan dan masyarakat yang bergerak disektor perikanan	Dinas Perikanan	1 Paket	20,000,000			1 Paket	22,000,000
		Tersedianya dana demplot peningkatan kualitas air melalui probiotik	-Pokdakan Berkat Benih Nagari Koto Tinggi Kec. Gunung Omeh - Pokdakan Ummi Shahidah Nagari Pilubang Kec. Harau - Pokdakan Sakinah Nagari Andiang Kec. Suliki	3 Paket	36,000,000			3 Paket	39,600,000
		Tersedianya dana CPCL Kegiatan, monitoring dan surveillance HPI	Kab. Lima Puluh Kota	1 paket	29,150,000			1 paket	32,065,000
2 05 XX 22	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan				443,425,000				484,125,000
2 05 XX 22 01	Kajian Sistem Penyuluhan Perikanan				443,425,000	APBD Kab.	Sesuai dengan Perda Nomor 15 Tahun 2016 dan Perbub Nomor 16 Tahun 2016		484,125,000
		Terlaksananya lomba pokdakan/pokmaswas tingkat Kabupaten	Kabupaten Lima Puluh Kota	1 Paket	20,000,000			1 Paket	22,000,000
		Terlaksananya penilaian peningkatan kelas kelembagaan perikanan	Kabupaten Lima Puluh Kota	1 Paket	11,000,000			1 Paket	12,100,000
		Terlaksananya rapat kerja dan koordinasi penyuluhan perikanan (training petugas dan penyuluh)	Kabupaten Lima Puluh Kota	12 Bulan	10,000,000			12 Bulan	11,000,000
		Terlaksananya kegiatan demfarm (kolam percobaan perikanan) yang dilaksanakan oleh penyuluh							-
		1. Budidaya lele dengan sistem bioflock	1. Pokdakan Melayu Sarangkua Dayuang Nagari Balai Panjang Kec. Lareh Sago Halaban. 2. Pokdakan Tobek Mitra Mandiri Nagari Batuhampa Kec. Akabiluru	2 Paket	100,000,000			2 Paket	110,000,000
		2. Demfarm budidaya lele dan aquaponik	Pokdakan Ingin Maju Nagari Mungo Kec. Luak	1 Paket	20,000,000			2 Paket	22,000,000
		3. Budidaya gurami percobaan	Pokdakan Palapa Mina Soang Jaya Nagari Tujuh Koto Talago Kec. Guguaq	1 Paket	50,000,000			1 Paket	55,000,000
		4. Terlaksananya kegiatan minapadi	1. Pokdakan Pelangi Minang Nagari Ampalu Kec. Lareh Sago Halaban. 2. Pokdakan Suka Damai Nagari Sungai Rimbang Kec. Suliki 3. Pokdakan Telaga Nirwana Nagari Batuhampa Kec. Akabiluru	3 Paket	99,000,000			3 Paket	108,900,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2022	
				Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12
		Terlaksananya keikutsertaan dalam GOP tingkat Provinsi Sumatera Barat	Kabupaten Lima Puluh Kota	1 Paket	5,000,000			1 Paket	5,500,000
		Tersedianya komputer dan printer untuk pengelolaan aplikasi kelembagaan perikanan	Kabupaten Lima Puluh Kota	1 Paket	13,000,000			1 Paket	14,300,000
		Terlaksananya kegiatan kaji terap pakan alami	Kabupaten Lima Puluh Kota	1 Paket	5,000,000			1 Paket	5,000,000
		Terlaksananya SL kegiatan demfarm perikanan	Kabupaten Lima Puluh Kota	8 Paket	30,875,000			8 Paket	30,875,000
		Terlaksananya pembentukan asosiasi perikanan	Kabupaten Lima Puluh Kota	1 Paket	7,000,000			1 Paket	7,700,000
		Terlaksananya dana kegiatan untuk CPCL, Pembinaan dan Monev Kegiatan	Kab. Lima Puluh Kota	12 Bulan	60,050,000			12 Bulan	66,000,000
		Tersedianya media penyuluhan berupa brosur dan leaflet	Kabupaten Lima Puluh Kota	5 Paket	12,500,000			1 Paket	13,750,000
2 05 XX 23	Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran				1,112,525,000				1,214,730,500
2 05 xx 23 01	Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan				577,770,000	APBD Kab.	Sesuai dengan Perda Nomor 15 Tahun 2016 dan Perbub Nomor		629,000,000
		Terlaksananya pameran pembangunan setiap tahunnya dan terikutinya jambore PKK, bazar dan kegiatan lainnya	Kab. Lima Puluh Kota dan Luar Daerah	1 Paket	70,000,000			1 Paket	55,000,000
		Promosi Perikanan (Sumbar Expo,Aqua culture,Sea food expo,Hari Pangan Se dunia dll)	Dalam dan Luar Provinsi	1 Paket	145,000,000			1 Paket	205,000,000
		Memfasilitasi Pelaku Usaha Perikanan untuk mengikuti Pameran dan Arena	Sarilamak dan Padang	1 Paket	15,000,000			1 Paket	33,000,000
		Tinjauan Teknis Penguatan Daya Saing Produksi Hasil perikanan	Luar Provinsi	1 Paket	82,770,000			1 Paket	115,000,000
		Terlaksananya konsultasi, koordinasi, pembinaan, monitoring monev kegiatan tahun sebelumnya dan sedang berjalan	Provinsi, Kecamatan, Nagari	1 Paket	50,000,000			1 Paket	53,000,000
		Uang Saku Penjaga Stand Pameran	pedagang, pemasar dan pembudidaya	1 Kali	5,000,000			1 Paket	125,000,000
		Terlaksananya lomba UPPN Kab. Lima Puluh kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	1 Paket	10,000,000			1 Paket	43,000,000
		Pengadaan Billboard dan papan informasi pasar	Pasar di Kab. Lima Puluh Kota	8 Paket	200,000,000				
2 05 xx 23 02	Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan				428,950,000	APBD Kab.	Sesuai dengan Perda Nomor 15 Tahun 2016 dan Perbub Nomor 16 Tahun 2016		469,345,000
	Identifikasi Rumah Tangga Pengolah Ikan (RTPI), Unit Pengolah Ikan (UPI)	Teridentifikasinya rumah tangga pengolah ikan dan UPI	13 Kecamatan,Nagari	1 Paket	28,950,000			1 Paket	31,845,000
	Lomba Gemarikan Tk. Kabupaten dan Provinsi	Terlaksananya kegiatan lomba gemar ikan Tk. Kabupaten dan Provinsi (lomba masak serba ikan, Forikan, PAUD, Inovasi, Jingle Gemarikan, Hari Ikan, Promosi Gemarikan)	Kabupaten dan Provinsi	7 Kali	70,000,000			7 Kali	77,000,000
	Pengembangan Informasi Pengolahan Hasil Perikanan	Tersedianya informasi tentang pengolahan perikanan (Leaflet, Banner, Poster, Plank merek)		1 Paket	30,000,000			1 Paket	33,000,000
	Mengikuti Kegiatan Peningkatan Daya Saing dan even Gemarikan	Terikuti dan terlaksananya kegiatan peningkatan daya saing dan event Gemarikan (Lomba Masak Tk. Nasional dll)	Dalam dan Luar Daerah	1 Paket	65,000,000			1 Paket	71,500,000
	Pembinaan / Penguatan Kelembagaan Forikan	Terlaksananya penguatan kelembagaan Forikan seperti : 1. Rapat teknis penyusunan perencanaan program dan evaluasi Program Gemarikan 2. Monev Gemarikan Tk. Kecamatan dan Nagari 3. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang Gemarikan	Kabupaten, Kecamatan dan Nagari	1 Paket	35,000,000			1 Paket	42,000,000
	Tersedianya Billboard Gemarikan/Balho Gemarikan	Tersedianya informasi /Balho tentang program Gemarikan	Kecamatan Pangkalan, Payakumbuh, Akabiliru	13 Paket	150,000,000			13 Paket	155,000,000
	Peringatan Hari Ikan Kabupaten Lima Puluh Kota	Terperingatinya Hari Ikan Kabupaten Lima Puluh Kota	Sarilamak	1 Paket	25,000,000			1 Paket	32,000,000
	Promosi Gemarikan	Terlaksananya Promosi gemarikan kepada masyarakat	Lima Puluh Kota	1 Paket	25,000,000			1 Paket	27,000,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2022	
				Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12
2 05 XX 23 03	Pengendalian dan pengawasan Mutu Hasil Perikanan	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk perikanan			105,805,000	APBD Kab.	Sesuai dengan Perda Nomor 15 Tahun 2016 dan Perbub Nomor 16 Tahun 2016		116,385,500
		Terawasnya mutu hasil perikanan di sentra pengolahan dan pasar	Poklahsar, pasar ikan,UPI	1 Paket	6,000,000			1 Paket	6,600,000
		Terawasnya mutu sampel pakan poklahsar dan pabrik	Poklahsar, toko	1 Paket	4,000,000			1 Paket	4,400,000
		Tersedianya dana penunjang kegiatan (cetak leaflet, penggandaan, materai, makan minum)	Dinas Perikanan	3 Paket	2,000,000			3 Paket	2,200,000
		Terlaksananya surveillance pengawasan mutu hasil pengolahan, mutu obat, mutu benih, induk dan pupuk	Poklahsar, pasar ikan, UPI, pembudidaya ikan, toko obat	1 Paket	18,805,000			1 Paket	20,685,500
		Tersedianya sarana pengujian mutu hasil perikanan	Dinas Perikanan	1 paket	75,000,000			1 paket	82,500,000
2 05 xx 24	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar				1,029,850,000				1,117,780,000
2 05 xx 24 01	Kegiatan Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Tergalinya potensi perairan umum daratan			732,050,000	APBD Kab.	Sesuai dengan Perda Nomor 15 Tahun 2016 dan Perbub Nomor 16 Tahun 2016		790,200,000
	Kajian Pengaruh Sumberdaya Manusia, Kesadaran Lingkungan dan Modal Usaha terhadap kinerja Nelayan Lima Puluh Kota	Kajian Pengaruh Sumberdaya Manusia, Kesadaran Lingkungan dan Modal Usaha terhadap kinerja nelayan	Kab Lima Puluh Kota	1 paket	120,000,000			1 paket	123,000,000
	Pengadaan perahu dan sarana alat penangkap ikan	Tersedianya perahu dan sarana alat penangkap ikan untuk meningkatkan hasil tangkapan	- KUB Kampung Tarandam Nagari Tanjung Pauh - KUB Nago Saiyo Nagari Pangkalan	2 paket	240,000,000			2 paket	245,000,000
	Pengadaan benih dan pakan untuk Perairan Umum Daratan	Tersedianya benih dan pakan untuk Perairan Umum Daratan untuk meningkatkan hasil tangkapan	1. Pokmaswas Sungai Batang Durian, Nag. Maek 2. Pokmaswas Labu Ompong Nagari Durian Tinggi 3. Pokmaswas Mesjid Muklisin Nagari Koto Bangun 4. Pokmaswas Belibis Nag. Taram	4 paket	110,000,000			5 paket	115,000,000
		Terlaksananya restocking ikan garing di lubuk larangan	Pokmaswas	2 paket	162,200,000			2 paket	202,200,000
		Terlaksananya penunjang kegiatan dan honor	Kab Lima Puluh Kota	1 Keg	50,000,000			1 keg	23,000,000
		Tersedianya dana CPCL dan movev konsultasi dan	Kab Lima Puluh Kota	1 keg	39,850,000			1 keg	82,000,000
		Terlaksananya biaya operasional kendaraan roda 4	Kab Lima Puluh Kota	1 keg	10,000,000				
2 05 XX 24 02	Pengembangan Kawasan dan Pelestarian Sumberdaya	Berkembangnya kawasan pelestarian sumberdaya perikanan			297,800,000	APBD Kab.	Sesuai dengan Perda Nomor 15 Tahun 2016 dan Perbub Nomor 16 Tahun 2016		327,580,000
		- Tersedianya bahan uji coba budidaya sidat	BBI	1 paket	100,000,000			1 paket	110,000,000
		- Meningkatkan SDM petugas teknis tentang budidaya sidat	Dinas Perikanan	1 Paket	43,000,000			1 Paket	47,300,000
		- Terehabnya kolam pembenihan di Hatchery Ikan Garing dan Ikan Hias	Hatchery Situjuh dan Harau	2 Paket	75,000,000			2 Paket	82,500,000
		- Pengadaan pakan utk hatchery pembenihan ikan langka	Dinas Perikanan	1 paket	33,000,000			1 paket	36,300,000
		- Tersedianya dana penunjang kegiatan	Dinas Perikanan	1 paket	19,000,000			1 paket	20,900,000
		- Tersedianya dana identifikasi, verifikasi CPCL, koordinasi, konsultasi dan movev kegiatan	Kab. Lima Puluh Kota	1 paket	27,800,000			1 paket	30,580,000
		JUMLAH TOTAL			8,700,000,000				9,098,425,500

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja (Renja) Dinas Perikanan Tahun 2021 disusun melalui proses tahapan yang cukup panjang mulai dari Musrenbang Nagari, musrenbang tingkat kecamatan, musrenbang tingkat Kabupaten sampai pada Musrenbang Tingkat Propinsi dalam rangka memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi didalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.

Rencana Kerja Dinas Perikanan ini disusun mengacu pada Peraturan Bupati Nomor Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021. Sementara itu Renja 2021 yang disusun juga harus mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan 2016-2021.

Renja Dinas Perikanan ini memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Perikanan ini sangat tergantung kepada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Perikanan. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Dinas Perikanan, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Perikanan juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Dinas Perikanan dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut untuk satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumberdaya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perengkapan. Diharapkan pada awal tahun

kelola sumberdaya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan. Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun 2021, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2021 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Dinas Perikanan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal Juli 2020

PII KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



Ir. SEPDI PAINDAYERI
19650904199303 1 004